

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Desa Sukorejo yang merupakan salah satu LMDH di wilayah kerja PERUM PERHUTANI Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Blitar. PERUM PERHUTANI KPH Blitar sendiri berdasarkan letak geografisnya menaungi wilayah hutan yang terletak di 111°46'30"-112°30'30" BT dan 07°55'30"-08°21'30" LS, dengan total luas hutan 57.336,20 Ha. PERUM PERHUTANI KPH Blitar terbagi menjadi 8 Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH), 35 Resort Pemangkuan Hutan (RPH), dan memiliki mitra 126 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Secara administrasi letak kawasan hutan tersebut berada di 3 (tiga) kabupaten, yaitu : Kabupaten Tulungagung seluas 19.369,97 Ha, Kabupaten Blitar seluas 35.306,63 Ha, dan Kabupaten Malang seluas 2.659,60 Ha. Sedangkan untuk fungsi hutan di PERUM PERHUTANI Blitar terbagi menjadi 3 yaitu, hutan produksi seluas 37.014,20 Ha, hutan lindung seluas 17.073,10 Ha dan hutan dengan penggunaan lain seluas 3.148,90 Ha.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Profil PERHUTANI KPH Blitar tahun 2018

## 1. Gambaran Umum LMDH Desa Sukorejo

LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Desa Sukorejo berkedudukan di desa Sukorejo Rejotangan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. LMDH desa Sukorejo ini secara administrasi termasuk di wilayah BKPH Rejotangan KPH Blitar. Maksud pembentukan LMDH ini adalah untuk menghimpun atau memberdayakan potensi sumberdaya hutan dalam pembangunan dan pengelolaan sumberdaya hutan sehingga terbentuk sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) bagi kepentingan Masyarakat Desa Hutan (MDH), masyarakat luas, pemerintah dan kelestarian lingkungan.

Sesuai dengan anggaran dasar, LMDH desa Sukorejo ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk melestarikan hutan demi anak cucu
- b. Untuk menambah rezeki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Untuk menjalin kerjasama dengan PERHUTANI

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah disebutkan maka LMDH ini memiliki kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan tegakan hutan yang meliputi kegiatan perencanaan, perseminan, penanaman, pemeliharaan, penanganan, penebangan, pengawasan, dan pengevaluasian.

- b. Menanami lahan dibawah tegakan dan lahan kosong dengan tanaman pertanian dan perkebunan
- c. Melakukan kegiatan usaha ekonomi bersama
- d. Melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan seperti penyuluhan dan pembinaan masyarakat

## **2. Keanggotaan**

Keanggotaan LMDH di desa Sukorejo ini memiliki jumlah sebanyak 95 orang. Keanggotaan LMDH ini bersifat terbuka dan sukarela. Sesuai dengan Anggaran Dasar anggota LMDH adalah masyarakat desa sekitar hutan dan masyarakat desa lain disekitarnya dengan syarat :

- a. Kehidupan bergantung pada sumberdaya hutan
- b. Mempunyai kepedulian terhadap kelestarian sumberdaya hutan

Semua anggota LMDH memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Taat dan melaksanakan aturan organisasi
- b. Berdisiplin tinggi
- c. Berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumberdaya hutan
- d. Mengelola sumberdaya hutan sesuai dengan batasan-batasan kesepakatan dengan PERHUTANI.

Semua anggota LMDH memiliki hak sebagai berikut:

- a. Mendapatkan bagi hasil kayu sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- b. Mendapatkan bagi hasil tanaman pertanian dari lahan andil bagian sesuai ketentuan yang berlaku
- c. Mendapatkan bagi hasil dari kegiatan usaha bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Mendapatkan upah dari hasil kerja kegiatan teknis kehutanan yang diselenggarakan oleh PERHUTANI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk perihal hilangnya keanggotaan, anggota LMDH dapat kehilangan status keanggotaannya apabila :

- a. Apabila anggota berhalangan tetap atau meninggal dunia
- b. Apabila anggota melanggar aturan-aturan yang telah disepakati Bersama.

### 3. STRUKTUR ORGANISASI LMDH SUMBER REJEKI DESA SUKOREJO WETAN KECAMATAN REJOTANGAN

Susunan Pengurus LMDH Sumber Rejeki Desa Sukorejo Wetan

Gambar 4.1

PELINDUNG	: KEPALA DESA
PENASEHAT	: 1.
	2. KETUA BPD
PEMBINA	:
PENDAMPING	:
KETUA I	: GHOPUR
KETUA II	: JARNO
SEKRETARIS I	: GUNARYO
SEKRETARIS II	: IMAMROFI'I
BENDAHARA I	: KATEMIN
BENDAHARA II	: TEGOLELONO
SEKSI TANAMAN	: SUMALI
	JUWARIN
SEKSI PERENCANAAN:	KHOIRI
	BIBIT ADIANTO
	PANIRAN
SEKSI PEMELIHARAAN:	MAHFUT
	GIMIN
	SUTO
SEKSI PERTANIAN	: JUMRONGI
	SYAMSUDIN
USAHA PRODUKTIF	: SUTRISNO
	SUPIYAN

#### 4. DATA LOKASI PERJANJIAN KERJASAMA PERUM PERHUTANI KPH BLITAR DGN LMDH REJOTANGAN

Data Petak LMDH Sumber Rejeki Desa Sukorejo Wetan

Kecamatan Rejotangan

No	RPH	Anak Peta k	Luas Bak u (Ha)	Jenis Tanaman Agroforestr y	Luas Agro (Ha)	Jumlah Penggara p (Org)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NGUBALAN	10A	-	Jagung	10,00	54	-
2	TANEN	18H	-	Jagung	4,80	10	-
3	TANEN	19H	-	Jagung	7,25	22	-
4	TANEN	20E	-	Jagung	3,50	9	-

#### B. Temuan Penelitian

1. Kontribusi Perum Perhutani terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung

Perum Perhutani ialah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.<sup>48</sup>

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Yadi selaku Kepala Asper Rejotangan KPH Blitar, menyatakan bahwa :

---

<sup>48</sup> Undang-Undang NO.19 Tahun 2003 tentang *Perusahaan Umum (PERUM)*, Pasal 1 ayat (4).

“Kontribusi Perum Perhutani KPH Blitar ini meliputi : sharing produksi kayu tebangan, sharing produksi non kayu (getah, wisata), pemanfaatan lahan, PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) program ini memberikan pinjaman lunak kepada masyarakat sekitar hutan untuk modal usaha”.<sup>49</sup>

Demikian juga dengan yang diungkapkan oleh bapak

Ghopur selaku ketua LMDH di desa Sukorejo sebagai berikut :

“Kontribusi Perum Perhutani KPH Blitar itu misalnya yang pertama sharing produksi kayu tebangan , lalu sharing produksi non kayu, lalu pemanfaatan lahan terus yang terakhir itu ada program dari Perum Perhutani yang disebut PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) program tersebut memberikan pinjaman modal usaha untuk masyarakat”<sup>50</sup>

Pendapat ini juga didukung oleh pak Malik selaku

masyarakat Desa Sukorejo, menyatakan bahwa :

“Kontribusinya itu pemanfaatan lahan, sharing produksi kayu tebangan mbak, non kayu juga ada, terus ada lagi program Perum Perhutani itu memberikan pinjaman modal masyarakat untuk modal usaha.”<sup>51</sup>

Adapun bentuk-bentuk kontribusi tersebut yang di

kemukakan oleh bapak Yadi Selaku Kepala Asper Rejotangan

KPH Blitar, menyatakan bahwa :

“Bentuk – bentuk kontribusi tersebut meliputi : pemberian uang sharing kepada lembaga masyarakat desa hutan sesuai hasil produksi yang diberikan, masyarakat dapat melakukan penanaman palawija dibawah tegakan dalam pola tumpang sari, memberikan modal usaha bagi masyarakat sekitar hutan dalam bentuk pinjaman lunak.”<sup>52</sup>

Pendapat ini juga sesuai dengan hasil wawancara yang

dilakukan dengan bapak Ghopur selaku Ketua LMDH desa

Sukorejo sebagai berikut :

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan bapak Yadi, tanggal 28 Desember 2020

<sup>50</sup> Wawancara dengan bapak Ghopur, tanggal 28 Desember 2020

<sup>51</sup> Wawancara dengan bapak Malik, tanggal 29 Desember 2020

<sup>52</sup> Wawancara dengan bapak Yadi, tanggal 28 Desember 2020

“Biasanya kontribusinya itu memberikan uang sharing ke LMDH sesuai hasil yang didapat dari tebangkan tersebut. Dan kemudian boleh melakukan penanaman palawija dalam pola, lalu memberikan pinjaman lunak juga untuk masyarakat”<sup>53</sup>

Pendapat ini juga didukung oleh pak Malik selaku masyarakat Desa Sukorejo, menyatakan bahwa :

“Mendapatkan pinjaman lunak, terus sistem tumpangsari itu boleh dilakukan, penanaman palawija itu juga boleh”<sup>54</sup>  
Selanjutnya dari masing-masing kontribusi yang diberikan

apakah ada pemberian upah kepada LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), dan jika ada pemberian upah sampai berapa, hal ini sebagaimana hasil wawancara bersama pak Yadi selaku Kepala Asper Rejotangan KPH Blitar menyatakan bahwa :

“Pemberian upah kepada masyarakat itu pada setiap kegiatan pekerjaan, itu contohnya seperti : pembukaan tanaman, tebangkan, persemaian, dan yang terakhir itu pemeliharaan. Kalau pemberian upah itu gini ya mbak, katakanlah dia melakukan penanaman dan dia sebagai pekerja nah disitulah dia dapet upah harian, kalau harian itu kurang lebih Rp. 100.000 ribu upah/hari. Pada saat dia bekerja dalam pembuatan tanaman, atau tebangkan itu disitu dia dibayar atau digaji tapi kalau tanaman itu upahnya harian kalau tebangkan dikasih sekian kibik sekian, macam-macam tergantung kegiatan, bisa kegiatan penebangan, angkutan itu tadi”<sup>55</sup>

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh bapak Ghopur selaku Ketua LMDH desa Sukorejo:

“Iya ada pemberian upah, dilihat dari kegiatan tebang tanaman dan juga dilihat dari segi kegiatan”<sup>56</sup>  
Pendapat ini juga di benarkan oleh pak Malik masyarakat

Desa Sukorejo menyatakan bahwa :

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan bapak Ghopur, tanggal 28 Desember 2020

<sup>54</sup> Wawancara dengan bapak Malik, tanggal 29 Desember 2020

<sup>55</sup> Wawancara dengan bapak Yadi, tanggal 28 Desember 2020

<sup>56</sup> Wawancara dengan bapak Ghopur, tanggal 28 Desember 2020



“Ada mbak, biasanya pemberian upah tergantung jenis kegiatan, itu kemarin waktu tebang dapat Rp.100.000 ribu/kegiatan tebang”<sup>57</sup>

Dilihat dari segi manfaat hutan sendiri tentunya, kegiatan tumpangsari di area sekitar hutan apakah diperbolehkan melakukan hal tersebut. Dan apakah kegiatan pengambilan kayu bakar itu diperbolehkan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara bersama pak Yadi selaku Kepala Asper Rejotangan KPH Blitar :

“Tumpang sari sendiri boleh dilakukan, tetapi tumpangsari dapat dilakukan pada tanaman samapai umur ke 3 (tiga) atau tutup kontrak, dan dapat dilakukan perpanjangan apabila membuat usulan dengan membuat perpanjangan kerjasama itu tadi. Kegiatan pengambilan kayu bakar itu boleh dilakukan selama tidak masuk kedalam kategori kayu pekas pada lokasi tebang”<sup>58</sup>  
Pendapat tersebut juga didukung dengan pendapat dari

narasumber pak Ghopur selaku Ketua LMDH desa Sukorejo.

Beliau mengatakan sebagai berikut :

“Iya boleh dilakukan, selama kontrak belum habis, dan juga selama tanaman muda umur 1-2 tahun. Tapi itu jika kontrak sudah habis membuat perjanjian lagi atau biasanya membuat perpanjangan kerjasama lagi dengan pihak Perum Perhutani. Kayu bakar itu boleh diambil selama tidak merusak tanaman (ranting)”<sup>59</sup>

Pendapat ini juga di benarkan oleh pak Malik masyarakat

Desa Sukorejo menyatakan bahwa :

“Boleh-boleh saja mbak, selama kontrak belum habis ya, nanti kalau sudah habis ya izin lagi untuk perpanjangan kontrak”<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan bapak Malik, tanggal 29 Desember 2020

<sup>58</sup> Wawancara dengan bapak Yadi, tanggal 28 Desember 2020

<sup>59</sup> Wawancara dengan bapak Ghopur, tanggal 28 Desember 2020

<sup>60</sup> Wawancara dengan bapak Malik, tanggal 29 Desember 2020

Dengan adanya Perum Perhutani apakah ikut serta dalam memajukan kesejahteraan masyarakat setempat dan dengan cara yang bagaimana Perum Perhutani mensejahterakan masyarakat sekitar hutan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara bersama pak Agung Budiono selaku KSS PHBM PERUM PERHUTANI KPH Blitar sebagai berikut :

“Iya karena Perum Perhutani melibatkan masyarakat didalam kawasan hutan itu tadi, dan tidak lupa juga Perum Perhutani melibatkan 8 Asper (Asisten Perhutani) diantaranya: Asper Campurdarat, Asper Kalidawir, Asper Rejotangan, Asper Lodoyo Timur, Asper Lodoyo Barat, Asper Kesamben, dan Asper Wlingi. Kegiatannya itu contohnya : bidang persemaian (masyarakat mendapatkan upah), memasang acir (bambu), tebangan (masyarakat mendapatkan upah dan jaminan keselamatan kerja). Disisi lain masyarakat juga bisa bekerjasama dengan Perum Perhutani dengan melakukan kegiatan penanaman dengan sistem tumpangsari”<sup>61</sup>  
Pendapat tersebut juga didukung oleh pak Purwanto selaku

POLHUT (Polisi Hutan) Perum Perhutani :

“Iya, jadi begini ya mbak, Perum Perhutani dalam melaksanakan segala kegiatan itu melibatkan LMDH beserta masyarakatnya, itu seperti sudah menjadi sebuah tradisi, disitu ada Perum Perhutani disitu juga ada LMDH beserta masyarakat sekitar”<sup>62</sup>  
Pendapat tersebut juga didukung pendapat dari narasumber

pak Ghopur selaku Ketua LMDH desa Sukorejo. Beliau mengatakan sebagai berikut :

“Iya mbk bisa dibilang ikut mesejahterakan juga, karena dengan adanya Perum Perhutani juga masyarakat mendapatkan upah (sharing produksi). Terus lek carane niku ya dalam kegiatan misalnya dalam bidang persemaian,

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan bapak Agung Budiono, tanggal 23 Desember 2020

<sup>62</sup> Wawancara dengan bapak Purwanto, tanggal 23 Desember 2020

memasang tanda itu atau bisa disebut icir dari bambu, terus kegiatan tebangan itu juga”<sup>63</sup>

Pendapat ini juga di benarkan oleh pak Malik masyarakat

Desa Sukorejo menyatakan bahwa :

“Iya, Perum Perhutani itu kalau mau melakukan kegiatan tebangan, itu selalu melibatkan masyarakat sekitar, dan dari kegiatan tebangan itulah masyarakat mendapatkan upah”<sup>64</sup>

Kemudian dengan adanya kontribusi yang diberikan oleh

Perum Perhutani apakah dapat memenuhi kebutuhan material

masyarakat desa Sukorejo. Hal ini sebagaimana hasil wawancara

bersama pak Ghopur selaku Ketua LMDH desa Sukorejo sebagai

berikut :

“Jadi begini mbk, peningkatan kesejahteraan petani tersebut ini dapat menambah pendapatan masyarakat (sharing produksi kayu) itu tadi, terus pada saat tebang ada *cash back* (sharing produksi kayu). Dan sharing produksi kayu ini bisa diterima di unit tebangan.”<sup>65</sup>

Pendapat ini juga di benarkan oleh pak Malik masyarakat

Desa Sukorejo menyatakan bahwa :

“Ya, dari adanya kontribusi tersebut masyarakat mendapatkan upah dan kebutuhan material pun tercukupi”<sup>66</sup>

Dan yang selanjutnya apakah sering terjadi kegiatan

bersama antara Perum Perhutani dengan LMDHnya. Hal ini

sebagaimana hasil wawancara bersama pak Yadi Kepala Asper

Rejotangan KPH Blitar sebagai berikut :

“Pastinya iya, karena dengan adanya kerjasama tersebut dapat menciptakan keharmonisan antara Perum Perhutani dengan masyarakat, dan dengan adanya kegiatan tersebut

---

<sup>63</sup> Waancara dengan bapak Ghopur, tanggal 28 Desember 2020

<sup>64</sup> Wawancara dengan bapak Malik, tanggal 29 Desember 2020

<sup>65</sup> Wawancara dengan bapak Ghopur, tanggal 28 Desember 2020

<sup>66</sup> Wawancara dengan bapak Malik, tanggal 29 Desember 2020

dapat terciptanya sebuah kebersamaan dan keuntungan untuk semua pihak maupun lingkungan secara berkepanjangan”<sup>67</sup>

Hal tersebut juga didukung oleh pak Ghopur selaku Ketua

LMDH desa Sukorejo sebagai berikut :

“Iya mbak, bersama LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) dan masyarakat sekitar. Ini kegiatannya contohnya seperti tanaman (persemaian), patroli, dan bakti sosial”.<sup>68</sup>

Pendapat ini juga di benarkan oleh pak Malik masyarakat

Desa Sukorejo menyatakan bahwa :

“Ya, sering mbak, bersama LMDH juga tentunya. Itu misalnya patrol, ya meminimalisir pencurian lah”<sup>69</sup>

Pendapat ini juga di benarkan oleh pak Aslam masyarakat

Desa Sukorejo menyatakan bahwa :

“Wah kalau itu sering mbak, setiap kegiatan itu ada semua, kalau disini itu orang-orangnya kompak semua”<sup>70</sup>

Selanjutnya dengan adanya pengelolaan hutan oleh Perum

Perhutani apakah tetap merasakan kenyamanan, dan apakah

kebutuhan daruriyah terpenuhi dengan adanya kontribusi dan

kerjasama dengan Perum Perhutani, Pendapat ini ialah hasil

wawancara dengan pak Ghopur selaku Ketua LMDH desa

Sukorejo, sebagai berikut :

“Dengan adanya pengelolaan hutan bersama Perum Perhutani kami merasakan kenyamanan mbak, karena itu tadi dapat menambah penghasilan masyarakat juga. Dan berbicara tentang kebutuhan tersebut ya pastinya terpenuhi. Terus begini misalnya, itu lahan baru habis tebangan itu yang diutamakan itu orang sekitar hutan terlebih dahulu,

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan bapak Yadi, tanggal 28 Desember 2020

<sup>68</sup> Wawancara dengan bapak Ghopur, tanggal 28 Desember 2020

<sup>69</sup> Wawancara dengan bapak Malik, tanggal 29 Desember 2020

<sup>70</sup> Wawancara dengan bapak Aslam, tanggal 29 Desember 2020

nah nanti misal ditanami kan bisa untung mbak, dan hal seperti itu menambah penghasilan masyarakat tentunya”<sup>71</sup>  
Pendapat ini juga di benarkan oleh pak Malik masyarakat

Desa Sukorejo menyatakan bahwa :

“Tetap nyaman, itu misalnya setelah kegiatan tebangan lalu ada lahan yang kosong, itu yang di kasih info terlebih dahulu selalu masyarakat sekitar hutan, kemudian lahan tersebut saya dan teman-teman gunakan untuk ditanami tanaman pokok. Dari situ kan nanti kalau panen menambah penghasilan kami juga”<sup>72</sup>  
Pendapat ini juga di benarkan oleh pak Aslam masyarakat

Desa Sukorejo menyatakan bahwa :

“*Naa lek niku mesti mbak*, nanti masyarakat dikasih info duluan kalau ada lahan kosong habis teabangan, kan sistimnya tebang tanam ya sekarang. Itu nanti sama masyarakat disini selalu diambil dan kemudian ditanami palawija”<sup>73</sup>  
Dengan adanya kerjasama dengan Perum Perhutani ini

apakah memberikan kemudahan kepada pekerja (masyarakat) yang ikut mengelola hutan. Pendapat ini ialah hasil wawancara dengan pak Ghopur selaku Ketua LMDH desa Sukorejo, sebagai berikut :

“Iya mbak, karena Perum Perhutani ini selalu memberikan sharing produksi dan ini dilakukan secara transparan dan terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Contoh kegiatannya ya itu, kegiatan kerjasama mengerjakan lahan misalnya (kontrak tanaman), nah itu nanti kan ya bagi hasil, kami mendapatkan upah ya itu tadi sharing produksi. Terus hak masyarakat itu juga ada mbak, hak masyarakat itu panen. Terus kewajibannya itu sharing produksi kayu. Nah disini kerjasama kami sangat bagus. Pada prinsipnya itu begini, Perum Perhutani melibatkan masyarakat untuk mensukseskan bidang tanaman atau pengamanan (pencurian). Karena Perum Perhutani ini bermitra dengan masyarakat”<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan bapak Ghopur, tanggal 28 Desember 2020

<sup>72</sup> Wawancara dengan bapak Malik, tanggal 29 Desember 2020

<sup>73</sup> Wawancara dengan bapak Aslam, tanggal 29 Desember 2020

<sup>74</sup> Wawancara dengan bapak Ghopur, tanggal 28 Desember 2020

Pendapat ini juga di benarkan oleh pak Min selaku Bendahara LMDH Desa Sukorejo menyatakan bahwa :

“*Nggeh ada, karena menambah pemasukan. Pada dasarnya itu Perum Perhutani melibatkan masyarakat ya mbak, itu untuk mensukseskan bidang tanaman selain itu juga pengamanan. Karena mitra Perum Perhutani ialah masyarakat*”.<sup>75</sup>

Pendapat ini juga di benarkan oleh pak Aslam masyarakat Desa Sukorejo menyatakan bahwa :

“*Iya, kalau memberikan kemudahan itu iya mbak, karena disetiap kegiatannya itu tadi kami mendapatkan upah, dan kami juga mempunyai hak yaitu hak panen*”.<sup>76</sup>

## **2. Tawaran kemitraan yang diberikan oleh Perum Perhutani kepada masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung**

Berbicara dengan tawaran kemitraan yang diberikan oleh Perum Perhutani apakah ada kerjasama antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa setempat. Pendapat ini ialah hasil wawancara dengan pak Agung Budiono selaku KSS PHBM PERUM PERHUTANI KPH Blitar sebagai berikut :

“*Tawaran kemitraan itu pastinya ada mbak, itu tawarannya contohnya yang pertama tanaman sengon, terus yang kedua wisata*”.<sup>77</sup>  
Pendapat ini juga dibenarkan oleh pak Min selaku

Bendahara LMDH desa Sukorejo menyatakan bahwa :

“*Iya yang disampaikan pak agung tadi itu, dapat berupa tanaman sengon sama wisata, tapi kalau disini wisata ya itu alam kandung*”.<sup>78</sup>

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan bapak Min, tanggal 28 Desember 2020

<sup>76</sup> Wawancara dengan bapak Aslam, tanggal 29 Desember 2020

<sup>77</sup> Wawancara dengan bapak Agung Budiono, tanggal 23 Desember 2020

Pendapat ini juga dibenarkan oleh pak Malik masyarakat desa Sukorejo menyatakan bahwa :

“Kalau disini itu wisata contohnya alam kandung itu. Lalu penanaman sengon juga ada”<sup>79</sup>

Dan apakah ada program yang dibuat Perum Perhutani untuk menggandeng masyarakat sekitar hutan dan jika ada apa saja.

Pendapat ini ialah hasil wawancara dengan pak Agung Budiono selaku KSS PHBM PERUM PERHUTANI KPH Blitar sebagai berikut :

“Ada, program kemitraannya itu misalnya Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), program ini memberikan pinjaman lunak yang gunanya untuk mempermudah masyarakat mbak. Contohnya itu budidaya ikan koi, ayam. Ada juga yang sarana umum ini contohnya memperbaiki mushola, memberikan bantuan air bersih”<sup>80</sup>

Pendapat ini juga dibenarkan oleh pak Min selaku

Bendahara LMDH desa Sukorejo menyatakan bahwa :

“PKBL mbak, Program Kemitraan Bina Lingkungan. Program ini sama dengan apa yang dikatakan oleh pak agaung yaitu program pinjaman lunak yang gunanya untuk memberikan kemudahan untuk masyarakat”<sup>81</sup>

Pendapat ini juga dibenarkan oleh pak Malik selaku

masyarakat desa Sukorejo menyatakan bahwa :

“Iya ada mbak, dulu waktu desa sini kekiringan, Perum Perhutani memeberikan bantuan berupa air bersih”.<sup>82</sup>

Selanjutnya ialah pembentukan LMDH. Pembentukan

LMDH ini pendapat dari hasil wawancara dengan pak Agung

---

<sup>78</sup> Wawanacara dengan bapak Min, tanggal 28 Desember 2020

<sup>79</sup> Wawancara dengan bapak Malik, tanggal 29 Desember 2020

<sup>80</sup> Wawancara dengan bapak Agung Budiono, tanggal 23 Desember 2020

<sup>81</sup> Wawancara dengan bapak Min, tanggal 28 Desember 2020

<sup>82</sup> Wawancara dengan bapak Malik, tanggal 29 Desember 2020

Budiono selaku KSS PHBM PERUM PERHUTANI KPH Blitar sebagai berikut :

“Jadi begini mbak, LMDH ini terjadi jadi rapat anggota masyarakat yang berdasarkan footing pemilihan tersebut dan ditetapkan langsung oleh Kepala Desa. LMDH ini derajatnya sama atau sejajar dengan anggota Perum Perhutani lainnya. LMDH ini yang membuat Kepala Desa dan di SK (Surat Keputusan) oleh Kepala Desa setempat”<sup>83</sup>

Pendapat ini juga dibenarkan oleh pak Purwanto selaku

POLHUT(Polisi Hutan) KPH Blitar menyatakan bahwa :

“LMDH terjadi dari rapat anggota masyarakat berdasarkan footing. Pemilihan tersebut ditetapkan oleh kepala desa. LMDH ini derajatnya sama dengan pegawai Perum yang lain”<sup>84</sup>

Pendapat ini juga dibenarkan oleh pak Ghopur selaku Ketua

LMDH desa Sukorejo menyatakan bahwa :

“LMDH terjadi dari rapat anggota masyarakat terlebih dahulu kemudian pemilihan tersebut berdasarkan footing, dan ditetapkan oleh kepala desa. Begini ya, dibuat oleh kepala desa kemudian di SK-kan oleh kepala desa Sukorejo Wetan”.<sup>85</sup>

Dalam melakukan kerjasama apakah pihak Perum Perhutani

ada perjanjian tertulis untuk masalah pengelolaan hutan bersama masyarakat. Jika ada dalam bentuk apa saja. Pendapat ini ialah

hasil wawancara dengan pak Agung Budiono selaku KSS PHBM

PERUM PERHUTANI KPH Blitar sebagai berikut :

“Ada, dalam bentuk PKS (Perjanjian Kerjasama). Dalam bentuk misalnya : agroforestry, agrowisata (contohnya sirih kencong, pantai, bukit jodo, dll), tanaman sengon (swadaya), budidaya tambak udang.”<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan bapak Agung Budiono, tanggal 23 Desember 2020

<sup>84</sup> Wawancara dengan bapak Purwanto, tanggal 23 Desember 2020

<sup>85</sup> Wawancara dengan bapak Ghopur, tanggal 28 Desember 2020

<sup>86</sup> Wawancara dengan bapak Agung Budiono, tanggal 23 Desember 2020



Pendapat ini juga didukung wawancara dengan pak Syamsudin selaku SEKSI PERTANIAN LMDH desa Sukorejo, sebagai berikut :

“Iya ada mbak, KPS (Perjanjian Kerjasama) terus SP Tanaman atau hak dan kewajiban dari petani. Itu misalnya yang diterapkan didesa sini agroforestry, tanaman sengon itu masih 2 (dua) itu dulu”.<sup>87</sup>

Pendapat ini juga dibenarkan oleh pak Eko selaku Masyarakat desa Sukorejo menyatakan bahwa :

“Nggeh ada, SP(Surat Perintah) tanaman atau hak dan kewajiban dari petani”<sup>88</sup>

Tawaran kerjasama antara Perum Perhutani dengan pemerintah untuk tujuan mensejahterakan masyarakat. Dan jika ada dalam bentuk kerjasama yang bagaimana. Pendapat ini hasil wawancara dengan pak Min selaku Bendahara LMDH desa Sukorejo, sebagai berikut :

“Jadi begini mbak Perum Perhutani ialah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang punya mandat dari pemerintah sebagai pengelolaan hutan di pulau Jawa dan Madura. Dan bentuk kerjasamanya itu ialah dalam pengelolaan hutan dengan tujuan pemberdayaan dengan mensejahterakan masyarakat itu tadi”<sup>89</sup>

Pendapat hasil wawancara dengan pak Eko selaku Masyarakat desa Sukorejo menyatakan bahwa :

“Kalau itu menurut saya belum mbak, kalau itu bagaimana ya. Jadi gini mbak, pemerintah itu jangkauannya kan luas, mungkin gini kalau menurut saya pemerintah itu mempunyai mandat untuk masyarakat. Nah kemudian perantaranya itu lewat Perum Perhutani ini”<sup>90</sup>

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan bapak Syamsudin, tanggal 29 Desember 2020

<sup>88</sup> Wawancara dengan bapak Eko, tanggal 29 Desember 2020

<sup>89</sup> Wawancara dengan bapak Min, tanggal 28 Desember 2020

<sup>90</sup> Wawancara dengan bapak Eko, tanggal 29 Desember 2020

### **3. Bagaimana upaya Perum Perhutani dalam menjalin hubungan masyarakat sekitar di Desa Sukorejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?**

Upaya Perum Perhutani menangani masalah keterbatasan SDA (Sumber Daya Alam). Pendapat ini ialah hasil wawancara dengan pak Agung Budiono selaku KSS PHBM PERUM PERHUTANI KPH Blitar sebagai berikut :

“Upaya Perum Perhutani menangani keterbatasan SDA ialah dengan itu mbak program mensukseskan tanaman yang ada di wilayah hutan. Misalnya mengadakan reboisasi, penanaman hutan bersama”<sup>91</sup>

Pendapat ini juga dibenarkan oleh pak Min selaku

Bendahara LMDH desa Sukorejo menyatakan bahwa :

“Melakukan reboisasi mbak, agar hutan sini itu terhindar dari banjir, tanah longsor dan bencana-bencana lainnya”<sup>92</sup>

Pendapat ini juga dibenarkan oleh pak Aslam selaku

Masyarakat desa Sukorejo menyatakan bahwa :

“Reboisasi, lalu tebang tanam itu,kalau dulu itu kan tebang saja ya. Tapi sekarang biar ekosistemnya tidak terganggu akhirnya memilih untuk tebang tanam langsung”<sup>93</sup>

Apakah ada aturan mengenai eksploitasi hutan. Pendapat ini

ialah hasil wawancara dengan pak Agung Budiono selaku KSS

PHBM PERUM PERHUTANI KPH Blitar sebagai berikut :

“Ada mbak. Dalam UU 41 Tahun 1999 Pasal 50. Semua kegiatan atau kejadian kasus criminal misalnya itu ada hukumnya”<sup>94</sup>

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan bapak Agung Budiono, tanggal 23 Desember 2020

<sup>92</sup> Wawancara dengan bapak Min, tanggal 28 Desember 2020

<sup>93</sup> Wawancara dengan bapak Aslam, tanggal 29 Desember 2020

<sup>94</sup> Wawancara dengan bapak Agung Budiono, tanggal 23 Desember 2020

Pendapat ini juga dibenarkan oleh pak Min selaku Bendahara LMDH desa Sukorejo menyatakan bahwa :

“Ada mbak, ada itu, dan sudah di muat dalam UU 41 Tahun 1999 Pasal 50, sampean cari ya ada disitu”<sup>95</sup>

Pendapat ini juga dibenarkan oleh pak Syamsudin selaku Masyarakat desa Sukorejo menyatakan bahwa :

“Kemungkinan ada mbak itu di Undang-Undang, coba cari di Undang-Undang ya. Kalau masyarakat sini tahunya Cuma dasarnya saja. Lalu selebihnya pihak LMDH ya”<sup>96</sup>  
Dengan adanya kerjasama dengan masyarakat, apakah

Perum Perhutani memberikan beberapa fasilitas. Pendapat ini ialah hasil wawancara dengan pak Agung Budiono selaku KSS PHBM PERUM PERHUTANI KPH Blitar sebagai berikut :

“Untuk masyarakat sekitar hutan tentunya iya, kami memberikan fasilitas dalam bentuk kerjasama, pengelolaan kawasan hutan (sharing produksi), non kayu (menjaga atau menyadap getah pinus) tetapi untuk kawasan desa Sukorejo belum ada ya”.<sup>97</sup>

Pendapat ini juga di dukung wawancara dengan pak Min selaku Bendahara LMDH desa Sukorejo sebagai berikut :

“Iya mbak, dalam bentuk kerjasama, pengelolaan kawasan sekitar hutan (sharing produksi), non kayu (menjaga dan menyadap getah pinus) tetapi kalau getah pinus ini di desa kami belum ada. Dan Perum Perhutani ini memberikan fasilitas kepada masyarakat ini yang benar-benar interaksi langsung atau yang benar-benar membutuhkan dan peduli dengan kawasan hutan”.<sup>98</sup>

Pendapat ini juga dibenarkan oleh pak Syamsudin selaku Masyarakat desa Sukorejo menyatakan bahwa :

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan bapak Min, tanggal 28 Desember 2020

<sup>96</sup> Wawancara dengan bapak Syamsudin, tanggal 29 Desember 2020

<sup>97</sup> Wawancara dengan bapak Agung Budiono, tanggal 23 Desember 2020

<sup>98</sup> Wawancara dengan bapak Min, tanggal 28 Desember 2020

“Ya mbak, Perum Perhutani ini memberikan fasilitas ke masyarakat tidak pernah asal-asalan. Pihak Perum Perhutani memberikan fasilitas kepada masyarakat yang mau berinteraksi dengan pihak Perum Perhutani langsung dan masyarakat yang benar-benar peduli dengan hutan”<sup>99</sup>

Dan bagaimna upaya Perum Perhutani untuk memperbaiki

fasilitas masyarakat di desa Sukorejo. Pendapat ini ialah hasil

wawancara dengan pak Agung Budiono selaku KSS PHBM

PERUM PERHUTANI KPH Blitar sebagai berikut :

“Dengan cara sosialisasi, pertemuan antara Perum Perhutani dengan LMDHnya”<sup>100</sup>

Pendapat ini juga di dukung wawancara dengan pak Min

selaku Bendahara LMDH desa Sukorejo sebagai berikut :

“Upaya Perum Perhutani itu ya dengan cara sosialisasi dengan masayarakat, terus biasanya itu mengadakan pertemuan dengan LMDHnya”<sup>101</sup>

Pendapat ini juga dibenarkan oleh pak Eko selaku

Masyarakat desa Sukorejo menyatakan bahwa :

“Biasanya itu mengadakan rapat bersama dengan masyarakat beserta LMDH mbak”<sup>102</sup>

### **C. Analisis Data**

#### **1. Kontribusi Perum Perhutani terhadap kesejahteraan masyarakat**

##### **Desa Sukorejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung**

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dapat menganalisis bahwa Perum Perhutani sebagai Badan Usaha milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan bapak Syamsudin, tanggal 29 Desember 2020

<sup>100</sup> Wawancara dengan bapak Agung Budiono, tanggal 23 Desember 2020

<sup>101</sup> Wawancara dengan bapak Min, tanggal 28 Desember 2020

<sup>102</sup> Wawancara dengan bapak Eko, tanggal 29 Desember 2020

mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan hutan. Memiliki kerjasama yang baik dengan LMDHnya, sehingga tercipta hubungan yang baik dan harmonis.

Lembaga Masyarakat Desa Hutan Lembaga adalah wadah dimana sekumpulan orang berinisiatif untuk memenuhi kebutuhan bersama, dan yang berfungsi mengatur akan kebutuhan bersama tersebut dengan nilai dan aturan bersama. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah satu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang berada didalam atau disekitar hutan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhannya melalui interaksi terhadap hutan dalam konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Manfaat adanya LMDH yaitu :

1. Untuk memenuhi kebutuhan
2. Untuk menghasilkan peningkatan kemampuan lembaga dalam pengelolaan lembaga secara tunggal maupun kolektif
3. Serta mendorong lembaga untuk memiliki kekuatan dalam menghadapi dan berinteraksi dengan pihak luar, baik dalam daya dukung maupun dalam daya saing (kemampuan bernegosiasi).

Perum Perhutani selalu melibatkan masyarakat dalam semua kegiatan. Kontribusi yang diberikan Perum Perhutani dengan masyarakat juga menjadi salah satu hal yang membuat hubungan baik dengan LMDHnya. Kontribusi Perum Perhutani ialah sebagai berikut :

- a. Sharing produksi kayu tebangan
- b. Sharing produksi non kayu (getah, wisata)
- c. Pemanfaatan lahan (penanaman palawija)
- d. PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) program ini memberikan pinjaman lunak kepada masyarakat sekitar hutan untuk modal usaha.

Bentuk-bentuk kontribusi Perum Perhutani:

- a. Pemberian uang sharing kepada lembaga masyarakat desa hutan sesuai hasil produksi yang diberikan
- b. Masyarakat dapat melakukan penanaman palawija dibawah tegakan dalam pola tumpangsari
- c. Memberikan modal usaha bagi masyarakat sekitar hutan dalam bentuk pinjaman lunak.

Pemberian upah untuk masyarakat dilihat dari tebang tanaman dan juga dilihat dari beberapa kegiatan. Dilihat dari segi manfaat hutan sendiri tentunya contoh kegiatannya seperti :

- a. Kegiatan tanaman tebang persemaian
- b. Pemeliharaan

Pemberian upah dilihat berdasarkan masyarakat melakukan penanaman atau tebangan. Masyarakat sebagai pekerja disitulah masyarakat di beri upah harian. Upah harian tanaman kurang lebih Rp. 100.000 ribu/hari. Sedangkan upah harian tebangan diberikan per-kibik atau

hal tersebut bisa juga dilihat dari kegiatan dalam pembuatan tanaman atau tebangan. Masyarakat dibayar atau digaji setiap melakukan kegiatan.

Perum Perhutani juga memberikan kemudahan terhadap masyarakat sekitar hutan untuk melakukan tumpang sari. Sistem tumpang sari ini juga di rasakan manfaatnya oleh masyarakat karena mampu mengangkat perekonomian masyarakat sekitar hutan. Tumpang sari dapat dilakukan pada tanaman sampai umur ke tiga (tutup kontrak). Jika ingin melakukan tumpang sari kembali dapat melakukan perpanjangan kontrak dan membuat usulan, dengan membuat perpanjangan kerjasama.

Pengambilan kayu bakar oleh masyarakat diperbolehkan oleh pihak Perum Perhutani untuk kegiatan memasak dan dapat dicukupi melalui pemungutan ranting-ranting kering atau dahan berukuran dibawah diameter 7 cm. Kegiatan pengambilan ranting-ranting ini boleh dilakukan selama tidak merusak tanaman, karena bisa mengganggu pertumbuhan tanaman atau merusak ekosistem. Dan boleh dilakukan selama tidak masuk menjadi kayu pekas pada lokasi tebangan.

Seringnya terjadi kegiatan dengan masyarakat sekitar hutan membuat Perum Perhutani semakin mudah untuk menjalankan semua kegiatannya. Misalnya

dibidang persemaian dan patroli atau bakti sosial. Menurut salah satu narasumber, mengatakan bahwa dengan adanya pengelolaan hutan bersama Perum Perhutani, masyarakat mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu masyarakat lebih di utamakan dalam kegiatan lahan habis tebangan. Kegiatan habis tebangan tersebut Perum Perhutani memberikan lahan yang kemudian lahan tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk ditanami sayur-sayuran atau tumbuhan lainnya yang bisa menambah penghasilan masyarakat.

Perum Perhutani ikut memajukan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan 8 Asper meliputi :

- a. Asper campurdarat
- b. Asper Kalidawir
- c. Asper Rejotangan
- d. Asper Lodoyo Timur
- e. Asper Lodoyo Barat
- f. Asper Kesamben
- g. Asper Wlingi



**2. Tawaran kemitraan yang diberikan oleh Perum Perhutani kepada masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.**

Berdasarkan hasil wawancara Perum Perhutani mulai melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan produksinya pada tahun 1974. Program pertama yang dibuat ialah *prosperity approach* (pendekatan kemakmuran). Beberapa program dan faktor pendukungnya disusun untuk meningkatkan peranan hutan ikut dalam memakmurkan masyarakat di sekitar hutan. Seperti proyek kegiatan sebagai berikut :

- a. Bidang persemaian (masyarakat mendapatkan upah)
- b. Kegiatan memasang acir (bambu)
- c. Kegiatan tebangan (masyarakat mendapatkan upah atau jaminan keselamatan kerja).

Perum Perhutani memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar hutan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari kegiatan tersebut dapat menambah penghasilan masyarakat (sharing produksi kayu). HPD (Hutan Pangkuan Desa) pada saat tebangan memberikan cash back (sharing produksi kayu). Sharing produksi kayu bisa diterima saat kegiatan tebangan sudah selesai.

Program Perum Perhutani dengan menggandeng masyarakat sekitar hutan yaitu Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), program ini fungsinya yaitu memberikan

kemudahan pinjaman lunak untuk masyarakat. Contohnya ikan koi, ayam, dan lain-lain. Serta hibah (hadiah) berupa sarana umum, mushola, air bersih, dan lain-lain.

Adapun kerjasama Perum Perhutani dengan masyarakat yaitu:

- a. Tanaman sengon
- b. Wisata

Perum Perhutani dalam melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) ada perjanjian tertulis terkait tentang pengelolaan hutan bersama masyarakat yaitu:

- a. Agroforestree
- b. Agrowisata
  - Pantai
  - Bukit jodoh
  - Sirah Kencong, dan lain-lain.
- c. Tanaman sengon (swadaya)
- d. Budidaya tambak udang

### **3. Bagaimana upaya Perum Perhutani dalam menjalin hubungan masyarakat sekitar di Desa Sukorejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?**

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, kontribusi yang dapat diberikan Perum Perhutani kepada masyarakat desa ialah memberikan fasilitas dalam bentuk kerjasama, pengelolaan kawasan hutan (sharing produksi). Menurut

salah seorang sumber, kontribusi dari Perum Perhutani dalam bentuk upah maupun hasil tumpang sari nilainya cukup besar. Disamping itu petani desa Sukorejo mendapat tambahan lahan yang cukup luas dengan menggarap lahan Perhutani. Kontribusi yang cukup besar tersebut mencakup kayu untuk pekakas atau kayu gelondongan, rumput hasil dari pengolahan lahan kosong hutan negara.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) jenis kontribusi dari hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani, yaitu kontribusi berdsarkan kerelaan perusahaan atau kontribusi resmi, dan kontrubusi yang diambil langsung dari hutan negara. Kontribusi resmi diberikan kepada masyarakat dalam bentuk upah, hasil tumpangsari, dan kayu bakar. Sedangkan kontribusi yang diambil langsung oleh masyarakat desa Sukorejo berupa kayu bakar, rumput, pengelolaan lahan hutan. Sedangkan kontribusi resmi yang diberikan Perum Perhutani nilainya cukup besar yaitu, setiap kegiatan bisa Rp. 100.000/kegiatan.

Berikut ialah aturan eksploitasi hutan yang sudah dirangkum di UU 41 Tahun 1999 Pasal 50 yang berbunyi :

1. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
2. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan

kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

3. Setiap orang dilarang :

- a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah
- b. Merambah kawasan hutan
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
  1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau
  2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa
  3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai
  4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai
  5. 2 (dua) kali kedalam jurang dari tepi jurang
  6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai
- d. Membakar hutan
- e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang
- f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah

- g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri
- h. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan
- i. Menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang
- j. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang
- k. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang
- l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan dan
- m. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.